

# TANTANGAN KEIMIGRASIAN DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR-UTARA

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan Pada Kegiatan Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan  
Hak Asasi Manusia di Wilayah Melalui Opini Kebijakan

**"Membangun Indonesia Bagian Pinggiran Melalui SDM Keimigrasian di Wilayah Perbatasan"**

Samarinda, 13 April 2023

- ▶ **Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. (JG.Starke)**
- ▶ **Kawasan perbatasan adalah kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan atau hak berdaulat suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya (Mahendra Putra Kurnia)**
- ▶ **Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 6-nya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.**

**PERBATASAN NEGARA**

Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

**KAWASAN PERBATASAN INDONESIA**

## Kalimantan Timur

- ▶ Berbatasan langsung Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.
- ▶ KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHAKAM ULU

**PERBATASAN  
NEGARA CHAPTER  
KALTIMTARA**

## Kalimantan Utara

- ▶ Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak Malaysia

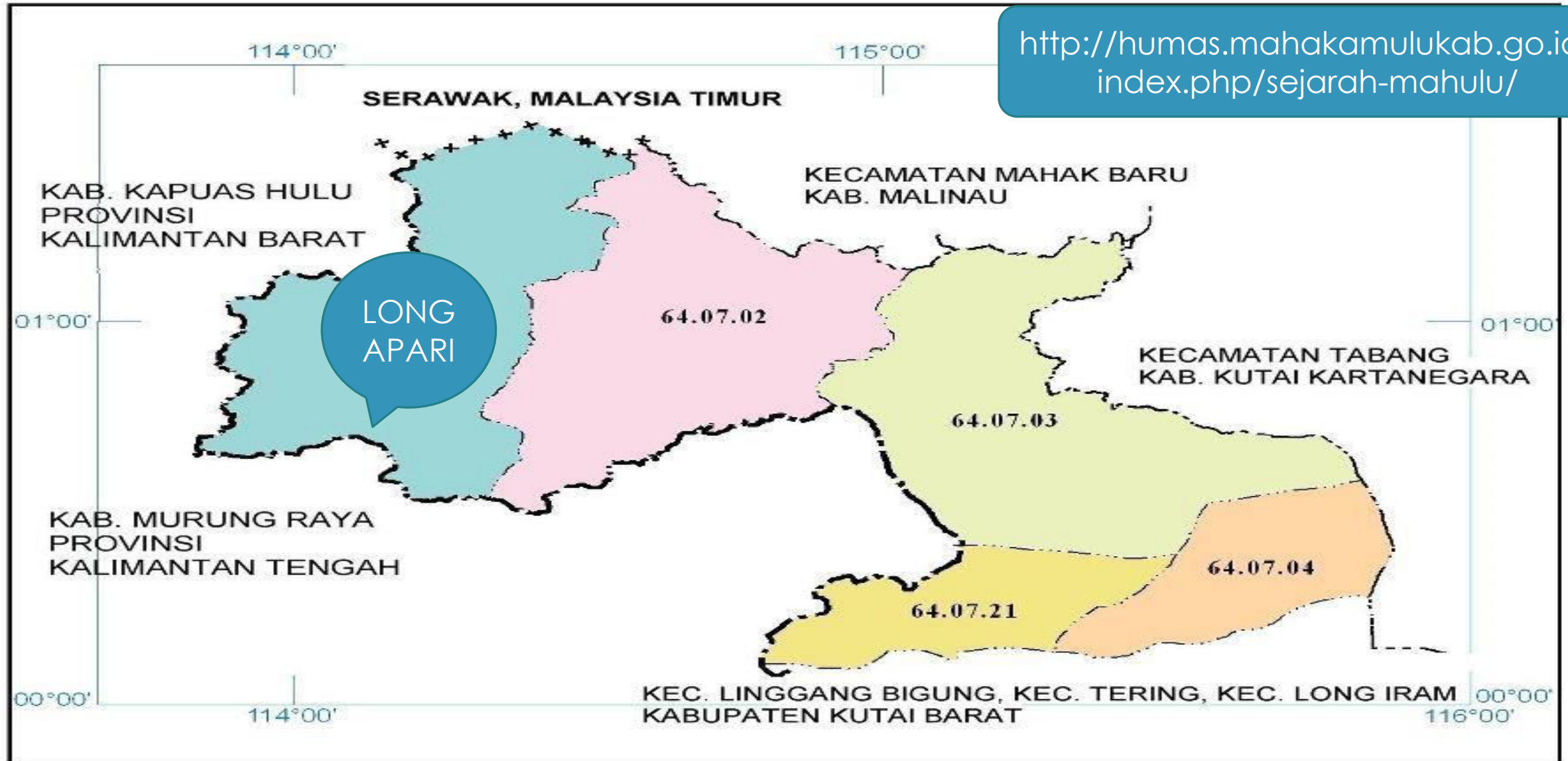
### KABUPATEN NUNUKAN

- Kecamatan Tulin Onsoi
- Kecamatan Sebatik Barat
- Kecamatan Sebatik Tengah
- Kecamatan Sebatik Timur
- Kecamatan Sebatik Utara
- Kecamatan Sebatik
- Kecamatan Sei Manggaris
- Kecamatan Krayan
- Kecamatan Krayan Selatan
- Kecamatan Lumbis Ogong

### KABUPATEN MALINAU

- Kecamatan Kayan Hulu
- Kecamatan Kayan Hilir
- Kecamatan Kayan Selatan
- Kecamatan Pujungan
- Kecamatan Bahau Hulu

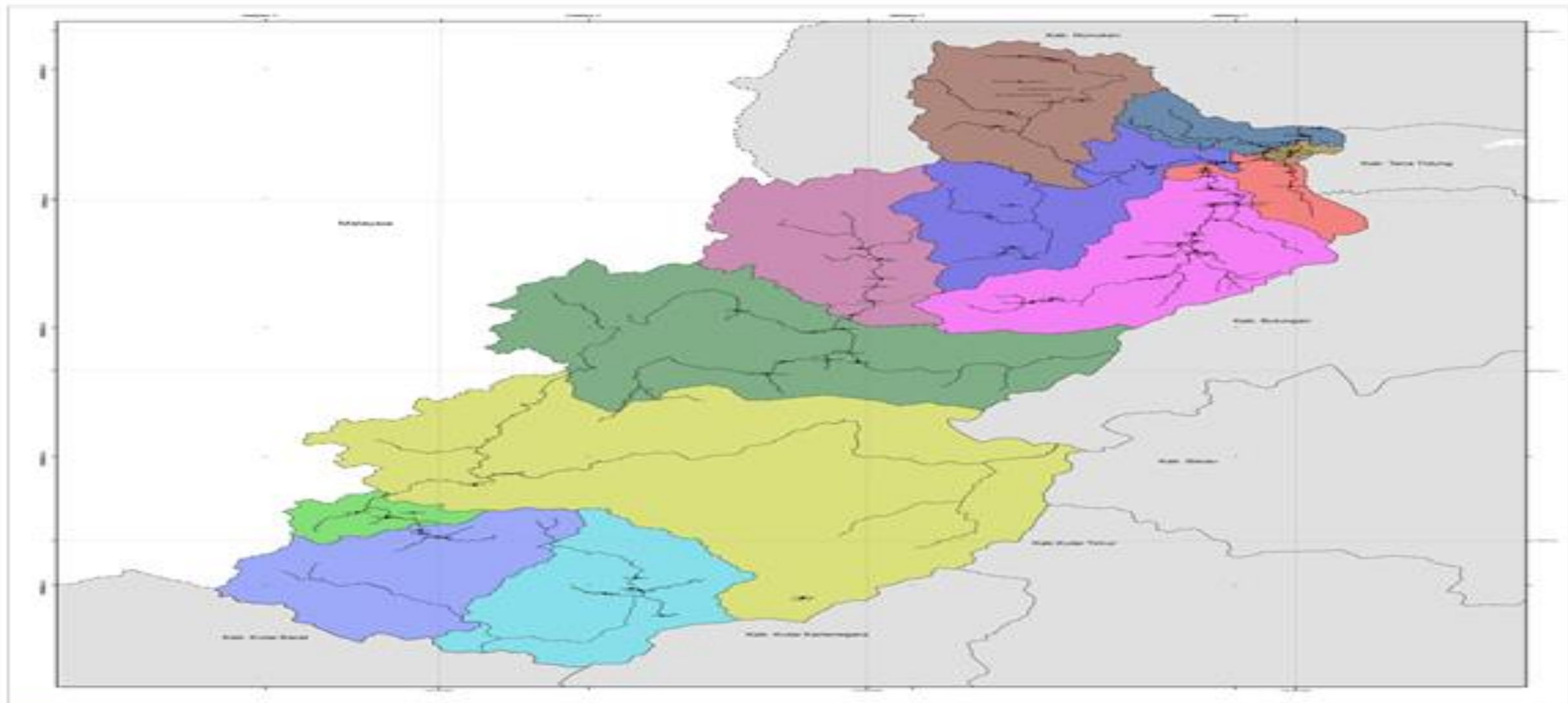
# PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN MAHAKAM ULU



64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

64.07 KABUPATEN MAHAKAM ULU





**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN MALINAU 2012 - 2032**

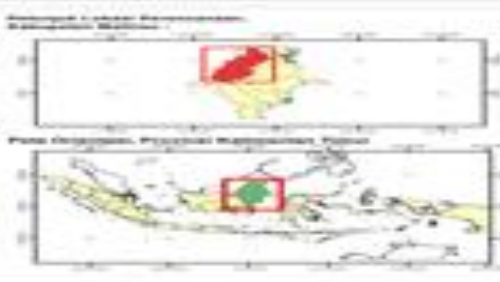
Skala: 1:100.000  
 Datum: WGS 1984  
 Proyeksi: UTM  
 Zona: 48N  
 Satuan: Meter  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Proyeksi: UTM  
 Zona: 48N  
 Satuan: Meter  
 Sistem Koordinat: UTM

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Tahun: 2012  
 No. Dokumen: 01/2012  
 No. Revisi: 01  
 Tanggal: 15 Desember 2011

Disetujui oleh: Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Tanggal: 15 Desember 2011  
 No. Dokumen: 01/2012  
 No. Revisi: 01  
 Tanggal: 15 Desember 2011

- PETA BATAS ADMINISTRASI**
- Legenda :**
- Batas Kota Kabupaten
  - Batas Kota Kecamatan
  - Desa
  - Batas Perjanjian
  - Batas Perjanjian
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Sungai

- KECAMATAN**
- KECAMATAN BAWANG HULU
  - KECAMATAN KAYAN HULU
  - KECAMATAN KAYAN HILIR
  - KECAMATAN MALINAU BARAT
  - KECAMATAN MALINAU KOTA
  - KECAMATAN MALINAU SELATAN
  - KECAMATAN MALINAU UTARA
  - KECAMATAN MENTARANG
  - KECAMATAN MENTARANG HULU
  - KECAMATAN PULUHAN
  - KECAMATAN SUNGAI BERA

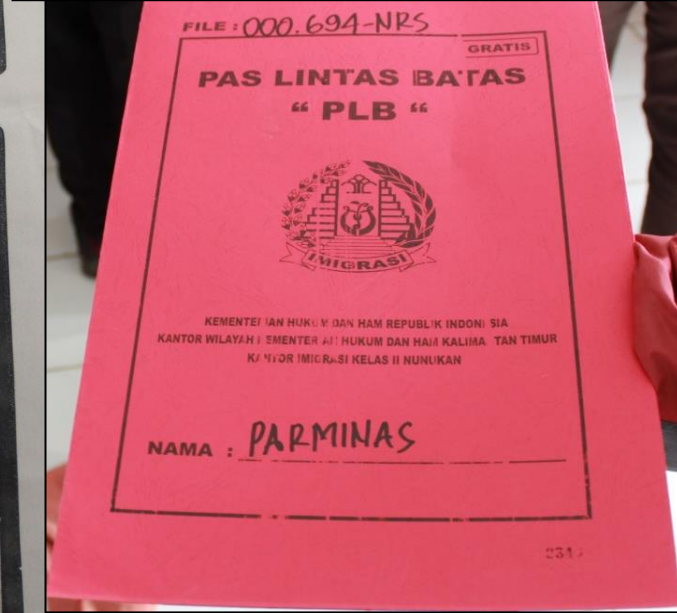
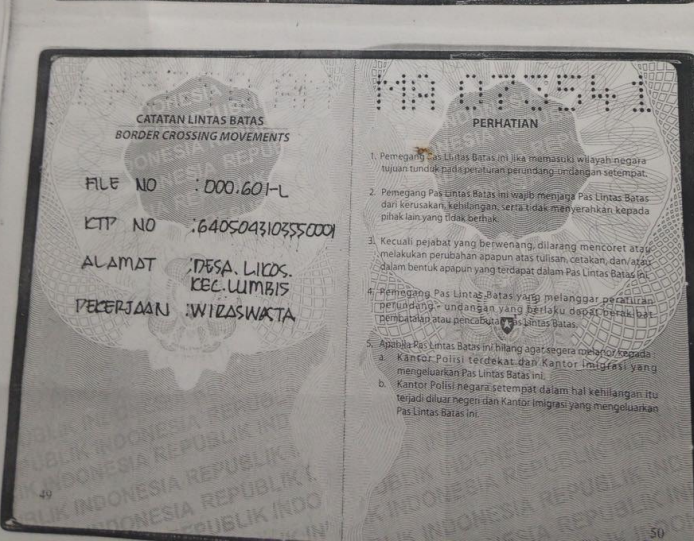
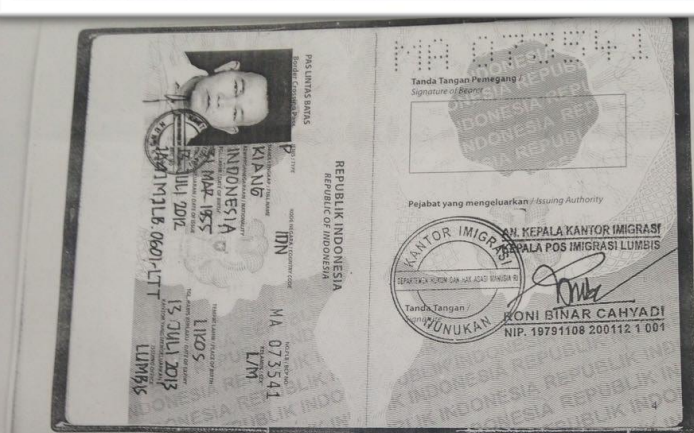


## MAU DIBILANG BAIK YA MEMANG BAIK...ADA PERKEMBANGAN CUKUP SIGNIFIKAN...MAU DIBILANG KURANG BAIK YA BUKTINYA MASIH ADA KAWASAN YANG TERTINGGAL, TERBELAKANG, DAN TERISOLIR

- ▶ Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, bandara, pelabuhan telah mulai ada dengan standar yang cukup.
- ▶ Infrastruktur jalan, penerangan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan televisi nasional pun telah ada
- ▶ Pos Lintas Batas Negara Terpadu Modern juga sudah mulai di bertebaran di kawasan perbatasan
- ▶ Kebutuhan pokok pun sudah mulai terpenuhi, yang sebelumnya “sangat bergantung” kepada suplay dari Malaysia karena lebih dekatnya jarak tempuh sudah mulai turun levelnya menjadi “agak bergantung”, tol laut membawa dampak.
- ▶ Kehidupan perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak menuju ke arah yang positif dengan memanfaatkan sumber daya/potensi lokal yang ada.
- ▶ Namun demikian belum seluruhnya merata di pelosok Kawasan perbatasan, masih ada desa yang jauh dari lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana umum.
- ▶ Masih ada beberapa titik atau *Outstanding Boundary Problems* (OBP) yang perlu dilakukan negosiasi penetapan batas negara dengan Malaysia

**KONDISI KAWASAN PERBATASAN DI KALTIMTARA HARI INI.....**

KELUAR		MASUK		RAJUK		TUNJUK		MORNING		DUNIA	
1	...	1	...	1	...	1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...	2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...	3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...	4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...	5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...	6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...	7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...	8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...	9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...	10	...	10	...	10	...





# Fungsi Keimigrasian di Perbatasan

## Pelayanan Keimigrasian

- Pemberian izin masuk/izin bertolak
- Penerbitan pas lintas batas

## Penegakan Hukum

- Pengawasan keimigrasian

## Keamanan Negara

- Menjaga kedaulatan negara

## Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

***“pengawasan lalu lintas orang di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara RI”***

# Tantangan Keimigrasian di Kaltimtara

---

Pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian

---

Tindak pidana lain terkait keimigrasian (perdagangan orang, penyelundupan orang, penyelundupan barang, penyalahgunaan narkotika, kejahatan perikanan, terorisme)

---

Kemudahan keluar masuk orang asing pasca UU/Perppu Cipta Kerja

---

Kondisi geografis Kalimantan Timur - Utara

# Langkah Strategis Menghadapi Tantangan

---

**PENINGKATAN KAPASITAS SDM**

---

**PEMBANGUNAN SARPRAS BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI**

---

**KERJA SAMA DALAM KERANGKA PENTAHELIX**

---

**KERJA SAMA DALAM KERANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM**

## PENINGKATAN KAPASITAS SDM (non-fisik)

- Peningkatan pemahaman komprehensif mengenai tipologi dan modus pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian serta tindak pidana lain terkait keimigrasian.
- Peningkatan pemahaman mengenai *Border Crossing Agreement*, *Border Trade Agreement*, peraturan perundang-undangan, teori konsep keimigrasian terbaru, teori konsep *archipelagic state*, geopolitik, perubahan peraturan pasca UU/Perpu Cipta Kerja, penguasaan teknologi informasi, dan lain-lain.
- Peningkatan pemahaman SDM dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun insidental seperti pelatihan, seminar, *workshop*, kursus, atau sejenisnya.
- Persoalannya adalah, seberapa sering kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di Kalimantan Timur-Utara? Seberapa besar minat SDM untuk mengikuti kegiatan tersebut? Apakah ada insentif menarik bagi SDM untuk mengikuti kegiatan tersebut?

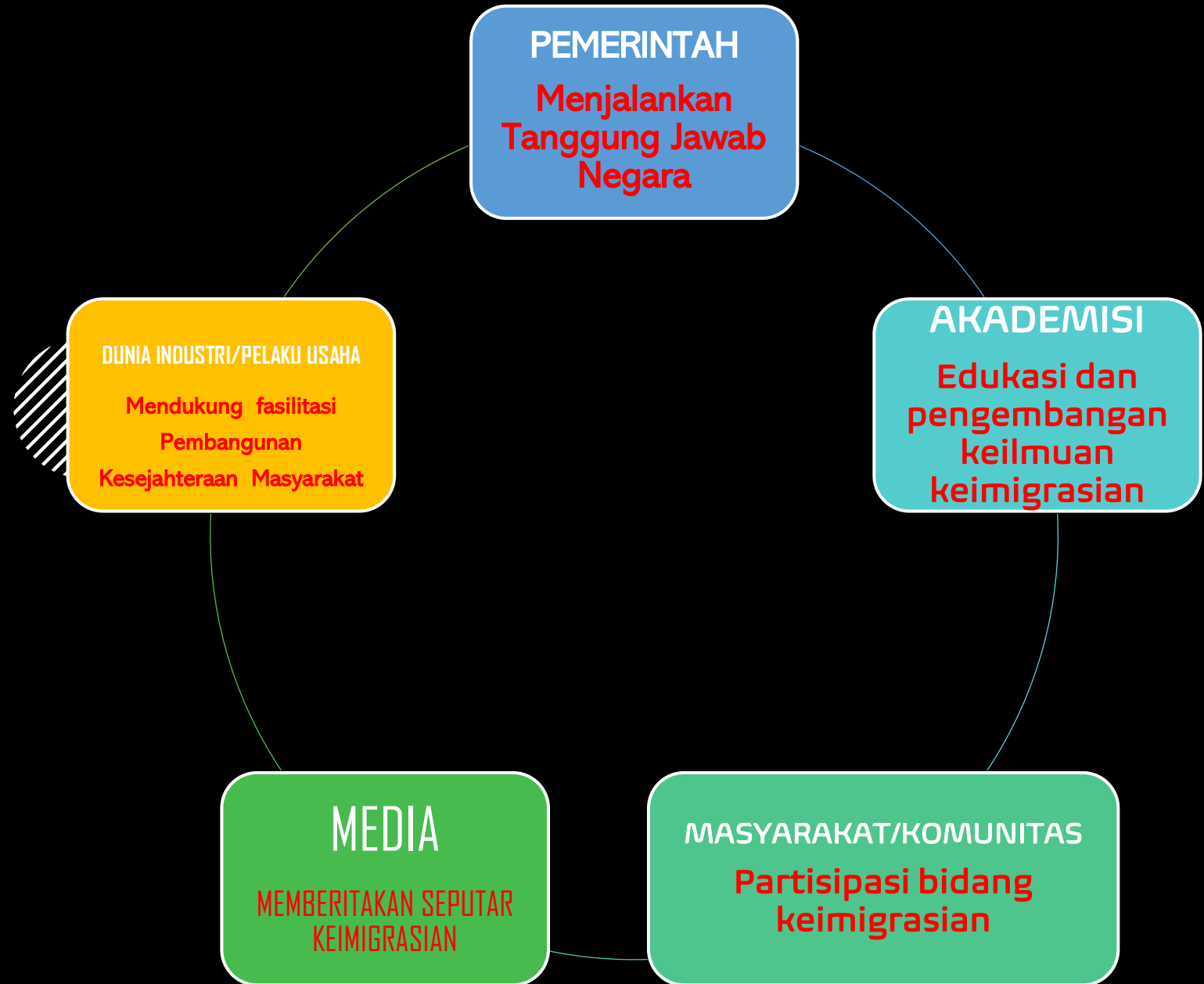


# PEMBANGUNAN SARPRAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- Sarpras keimigrasian di kawasan perbatasan adalah modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, jangan sampai tercipta kondisi “sudah orangnya kurang, minim pula sarprasnya”.
- Pemanfaatan teknologi informasi menjadi keharusan untuk menunjang pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
- Jangan sampai ketinggalan dengan Malaysia yang sudah terlebih dahulu memiliki pos lintas batas negara terpadu yang modern, beberapa contoh di Entikong maupun di Sebatik adalah fakta bahwa Indonesia agak terlambat merespon kebutuhan PLBNT di kawasan perbatasan



# PENTAHELIX DALAM KEIMIGRASIAN



# Kerja Sama Dalam Kerangka Pencegahan dan Penegakan Hukum



1. Menekan ego sektoral
2. Perencanaan Bersama untuk menghindari tumpang tindih program-kegiatan

# Skema

Tantangan

Langkah  
Strategis

Ketersediaan  
Anggaran



**MATUR  
NUWUN  
SEMOGA  
BERMANFAAT**